

RINGKASAN

Tubagus Fakhri Kurnia, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Kesalahannya Dalam Membuat Akta Notaris, Komisi Pembimbing Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H., anggota Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Salah satu hak yang dimiliki oleh seorang notaris adalah hak cuti. Notaris yang cuti diwajibkan menunjuk dan mengangkat seorang notaris pengganti untuk sementara menjalankan tugas dan jabatannya. Notaris pengganti memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang sama dengan notaris dalam membuat akta dan setiap aturan notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga berlaku untuk notaris pengganti. Tidak menutup kemungkinan seorang notaris pengganti melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab notaris pengganti terhadap kesalahannya dalam membuat akta notaris serta akibat hukum dan hak para pihak atas kesalahan akta yang dibuat notaris pengganti. Teori yang digunakan ialah teori tanggung jawab notaris, teori kewenangan notaris dan teori perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian yaitu kesalahan oleh notaris pengganti dalam membuat akta notaris maka notaris pengganti bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan tersebut. Akibat hukum atas akta jika terjadi kesalahan oleh notaris pengganti, apabila bersifat tidak substantif maka notaris pengganti melakukan perbaikan akta atau *renvoi* sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Bersifat substantif, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata berupa ganti kerugian. Kesalahan berulang kali oleh notaris pengganti maka dapat menjadi dasar Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat akan diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat secara berjenjang.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Notaris Pengganti, Perbuatan Melawan Hukum.

SUMMARY

Tubagus Fakhri Kurnia, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Kesalahannya dalam Membuat Akta Notaris, Advising Commission Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H., member Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

One of the rights possessed by a notary is the right to leave. A notary on leave is required to appoint and appoint a replacement notary to temporarily carry out his duties and positions. The substitute notary has the same responsibilities and authorities as the notary in making the deed and every notary rule in the Notary Office Law (UUJN) also applies to the substitute notary. Does not rule out the possibility of a substitute notary committing an error in carrying out his office. This study aims to analyze the responsibilities of a substitute notary for his mistake in making a notary deed as well as the legal consequences and rights of the parties for the mistake of a deed made by a substitute notary. The theories used are the theory of notary responsibility, the theory of notary authority and the theory of acts against the law. The research method used is normative juridical The methods of approach used is the legal approach and the conceptual approach. The source of legal material is secondary legal material.

The results of the study are errors by the substitute notary in making the notary deed, the substitute notary is fully responsible for the error. The legal consequences of the deed if there is an error by the substitute notary, if it is not substantive, the substitute notary will repair the deed or renvoi in accordance with the provisions of the Law on Notary Positions. Substantive in nature, the aggrieved party can file a civil lawsuit in the form of compensation. Repeated errors by a substitute notary can become the basis for the Regional Supervisory Council to carry out guidance and supervision. Administrative sanctions in the form of verbal warnings, written warnings, temporary dismissals, honorable dismissals or dishonorable discharges will be given by the Regional Supervisory Council and the Central Supervisory Council in stages.

Keywords: Responsibility, Substitute Notary, Illegal act.